

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

Lilis Setyowati¹

Wikan Isthika²

Ririh Dian Pratiwi³

^{1,2,3}Universitas Dian Nuswantoro
adelissetyowati@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is analyze the factors influence the quality of financial statement .This study uses primary data obtained from questionnaires to accounting of SKPD Semarang. The method used in this research is multiple regression analysis. The results of this study indicate that (1) the variable role of information technology did not significantly affect the quality of financial statements, (2) the competence of human resources significant positive effect on the quality of financial statements, (3) the role of internal audit significant positive effect on the quality of financial statements.

Keywords: *role of IT, competence of human resources, role of internal audit, and quality of financial statement*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang bagian akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: *peran TI, kompetensi SDM, peran internal audit, dan kualitas laporan keuangan*

1. PENDAHULUAN

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin banyak mendorong para penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih baik. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan nasional, diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlakukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas peting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tahun 2013 BPKP secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program/keahlian lintas sektoral, kebendaharaan umum negara/daerah dan kegiatan pengawasan lainnya atas penugasan presiden. BPKP secara rutin juga melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengawasan atas kualitas akuntabilitas keuangan daerah tahun 2014 menunjukkan bahwa telah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
(Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi)

terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta peningkatan indikator-indikator pengelolaan program lintas sektoral.

Ukuran akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan pemerintah. Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terdapat 6 pemerintah daerah (pemda yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 Pemda memperoleh opini WTP dengan Paragraf Penjelas, serta 24 pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun terjadi peningkatan, namun persentase jumlah LKPD yang diaudit BPK RI masih relatif kecil yaitu sebesar 30,56%, masih dibawah target nasional sebesar 60% di tahun 2015 (BPK, 2015).

Berdasarkan pada opini audit BPK di wilayah pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih relatif rendah, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan, pemahaman akuntansi, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, serta peran internal audit yang masih lemah.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang. Meskipun Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal auditor. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Roviyantie, 2011).

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di

pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Yuliani, 2010).

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. LKPD diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik untuk keputusan ekonomi sosial dan politik (Arsyati, 2010).

2.2. Peran Teknologi Informasi

Teknologi informasi diartikan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Roviyantie, 11).

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Yuliani, 2010).

Teknologi informasi merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Pemerintah daerah saat ini berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Teknologi informasi yang semakin maju memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, kehandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar. Persiapan penggunaan teknologi informasi terkadang membuat pekerjaan efektif dan efisien tetapi akan mengakibatkan berkurangnya pekerjaan suatu organisasi, disamping itu penggunaan teknologi informasi membutuhkan dana yang cukup mahal.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka

peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Peran teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Arsyati, 2008).

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran dan hasil (Roviyantie, 2011).

Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang kompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi tentang pemerintahan. Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Roviyantie, 2011).

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4. Peran Internal Audit

Internal audit merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi (Yuliani, 2010).

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada walikota. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota (Yuliani, 2010).

Dalam memainkan perannya auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa assurance yang merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain dan jasa konsultasi yang merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien, dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektifitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Adanya peran auditor internal yang baik akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya dilakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung (Umar, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat analisis.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagian keuangan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti antara lain: (a) pegawai negeri sipil, (b) pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan, dan (c) pegawai yang berkerja sebagai kepala bagian dan staf bagian akuntansi/keuangan. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 SKPD di Kota Semarang yang berjumlah 33 responden pegawai bagian keuangan di setiap SKPD.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Koefisien Determinasi

Dilihat dari *adjusted R square* yang artinya seberapa besar kontribusi variabel terikat.

3.3.2. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan peran teknologi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
(Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi)

informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit sebagai variabel independen.

Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- X1 : Peran Teknologi Informasi
- X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X3 : Peran Internal Audit
- β : Koefisien Korelasi
- α : Konstanta
- e : Error

3.3.3. Uji F

Uji model yang dilakukan adalah dengan melakukan Uji F. uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan telah sesuai atau tidak. Uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda dengan kriteria pengujian.

3.3.4. Uji t

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

- a. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima
- b. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak
- c. Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 1.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791 ^a	.626	.587	1.59040

a. Predictors: (Constant), audit intrnl, peran TI, kompetensi.sdm

b. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,587. Hal ini berarti 58,7% kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat dijelaskan oleh variabel peranan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit. Sedangkan 41,3%

variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak terdapat dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pengendalian intern, pengalaman kerja, dan beberapa faktor eksternal yang dianggap bisa mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

4.1.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Tampilan hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil uji F (Anova)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122.709	3	40.903	16.171	.000 ^a
Residual	73.352	29	2.529		
Total	196.061	32			

a. Predictors: (Constant), audit intrnl, peranTI, ,kompetensi.sdm
b. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Sumber: Data Diolah (2016)

Hasil pengujian ANOVA atau uji F pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,171 dengan tingkat signifikan 0,000 yang nilainya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

4.1.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing variabel bebas yaitu peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit terhadap variabel terikat yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hasil uji t ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-1.258	5.088		-.247	.806
kompetensi.sdm	.419	.167	.404	2.500	.018
peran.audit	1.012	.323	.423	3.135	.004
sia	.081	.120	.103	.676	.504

a. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel di atas merupakan hasil dari pengujian variabel peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
(Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi)

Penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$, nilai t tabel yang digunakan pada tingkat signifikan 5% dan $df=89$ sebesar 1,66216. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara individual variabel peran teknologi informasi memberikan nilai koefisien sebesar 0,676 (t hitung < t tabel) dengan probabilitas signifikan 0,504 (lebih besar dari nilai probabilitas 0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel peran teknologi informasi tidak berpengaruh secara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Variabel kompetensi sumber daya manusia memberikan nilai koefisien 2,500 dengan probabilitas signifikan 0,018. Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai hubungan yang searah dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil uji regresi di atas juga menunjukkan nilai t hitung pada variabel peran internal audit sebesar 3,135 dengan probabilitas signifikan 0,004. Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel peran internal audit mempunyai hubungan yang searah dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel peran teknologi informasi berada pada kategori baik, tapi pada kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

Dari distribusi frekuensi variabel peran teknologi informasi, dimana rata-rata tingkat capaian responden berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD

telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasikan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan peran teknologi informasi. Padahal pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik.

4.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang

Sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 2,500. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,66216. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,018 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Sehingga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi sumber daya manusia sebesar 0,404 yang berarti bahwa setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kota Semarang sebesar 1% maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan naik sebesar 40,4%. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2011) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan auditor internal pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Roviyantje (2012) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah survey pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Rahmawati (2010) menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Hal ini disebabkan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Pembentukan kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi

kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi.

4.2.3. Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang

Internal audit merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Dalam memainkan perannya auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa *assurance* yang merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain dan jasa konsultasi yang merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien, dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektifitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Adanya peran auditor internal yang baik akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel peran internal audit sebesar 3,135. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,66216. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,004 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Sehingga, variabel peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi peran internal audit sebesar 0,423 yang berarti bahwa setiap kenaikan peran internal audit sebesar 1% maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan naik sebesar 42,3%. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa peran internal audit mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Adanya peran internal audit akan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD. Proses review terhadap laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan oleh internal auditor atau inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2010) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian tersebut menemukan bahwa peran internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Winidyaningrum (2010) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- b. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- c. Peran internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- d. Peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

5.2. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu wilayah di Kota Semarang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
- b. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 58,7%. Sedangkan 41,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan masih kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- c. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

5.3. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

- a. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta peran internal audit telah baik dilakukan tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
- b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain seperti penerapan SAP, pengalaman kerja, pemahaman akuntansi, serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
- c. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan, dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Andreica, A. 2010. Information systems for financial and administrative management-case study on babes-bolyai university. *Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea*, 55(1), p.163.
- Arad, H. dan Hoda, A. 2009. *Information on Internal Controls*. SSRN Digital Library, Information Systems and Technology USA
- Arsyati. 2008. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNPB Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi*. Tesis. Universitas Syiah Kuala
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga
- Bharadwaj, A. S. 2000. A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. *MIS quarterly*, pp. 169-196.
- Doyle, J., Ge, W., dan McVay, S. 2007. Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of accounting and Economics*, 44(1), pp. 193-223.
- Freeman, R. J dan Shoulder, C. 2008. *Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Parctice*. Ninth Edition New Jersey: Pearson International edition
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), pp. 1-17
- Nordian, D. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat
- Roviyantie, D. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Universitas Siliwangi
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Rosmawato. 2011. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Komputer
- Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3 (2), pp. 206-220

